

003

KERUSUHAN AMBON SEBAGAI WUJUD MEMPEREBUTKAN SUMBER DAYA DAN KEHORMATAN

Oleh : Drs. Agus Wantoro, M.Si.

I. Pendahuluan

Berlarut-larutnya kasus kerusuhan Ambon seolah tidak bergeming dengan hiruk pikuk pendaratan pasukan Multinasional di Bumi Loro Sae Timtim.

Hal tersebut dikarenakan sebagian besar bangsa-bangsa di dunia saat ini, terfokus pada upaya penyelesaian masalah Timtim, sehingga seakan-akan konflik Ambon sudah terlupakan, meski korban tindak kekerasan terus berjatuhan dari waktu ke waktu. Harapan hidup rukun dan damai seolah tinggal impian, yang mustahil untuk diwujudkan, hanya tinggal kekuasaan serta mukjizat dari Tuhan Yang Maha Esa saja yang mungkin dapat menenangkan serta meredakan konflik yang berkepanjangan ini.

Bila di tengok ke belakang kerusuhan Ambon berawal dari masalah yang sangat sepele yaitu peristiwa kriminal pemerasan/palak antara preman etnis BBM atas nama Usman pada tanggal 19 Januari 1999 telah meminta uang disertai ancaman kepada sopir angkot etnis Ambon atas nama Yopi, merasa tidak senang atas tindakan Usman,

selanjutnya Yopi bersama-sama kelompoknya mengejar Usman. Isu yang berkembang Usman bukan malak tapi Usman disuruh pemilik angkot untuk menagih uang setoran angkot yang menunggak.

Kerusuhan yang berawal dari konflik antar individu tersebut berkembang menjadi konflik antar suku kemudian meluas menjadi antar agama (Islam vs Kristen/Katolik), yang melibatkan hampir keseluruhan warga Pulau Ambon, kemudian merebak ke pulau-pulau disekitar Ambon seperti Pulau Seram/Maluku Tengah, Maluku Tenggara dan justru kasus kerusuhan yang terkini merebak lagi di lokasi konflik lama yakni di kawasan Ahuru, Kecamatan Siri-mau dan kawasan Batu Merah Kodya Ambon yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 8 orang meninggal dunia. Berdasarkan kajian empirik dan informasi dari hasil pantauan maupun liputan media massa cetak maupun elektronika dapat ditarik **Critical Spot** bahwa kerusuhan yang terjadi dalam wujud saling bunuh dan saling menghancurkan dalam bentuk amuk massa, antara lain merupakan

produk dari para Patron Primordial yang bersaing untuk memperebutkan sumber-sumber daya politik, ekonomi dan sosial termasuk kehormatan yang melibatkan oknum-oknum yang berkepentingan.

Parsudi Suparlan (Peneliti Kasus Ambon) menyatakan bahwa persaingan dan konflik di antara para patron Primordial telah memungkinkannya di aktifkannya kesukubangsaan dan keyakinan keagamaan untuk menggalang solidaritas. Solidaritas keagamaan telah ditonjolkan dan melampaui batas-batas solidaritas suku bangsa. Kaburnya eksistensi Patron Primordial terhadap pengikutnya menimbulkan ketidakpastian dalam kehidupan bersama, saling curiga, mudah terpancing/terbakar emosi, kecemasan yang berlebihan serta ketidakpercayaan di antara sesama warga masyarakat, hal tersebut semakin diperkuat dengan ketidakberdayaan aparat penegak hukum dan aparat keamanan lainnya dalam mengatasi kerusuhan yang seolah tidak kunjung berakhir.

II. Kondisi Lingkungan Sosial

1. Posisi Strtegis Kota Ambon

* Ambon di sanping sebagai Ibu-kota Propinsi Maluku mempunyai posisi sentral dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial.

* Derap pembangunan nasional telah mendorong pertumbuhan dan kemajuan pesat kota Ambon

khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, telah memprosiskan Ambon sebagai kota dambaan bagi sebagian warga masyarakat pendatang utamanya dari Sulawesi Selatan (etnis Bugis, Buton, dan Makasar/BBM).

* Adanya Pelabuhan udara sebagai pendaratan transit sebelum melanjutkan penerbangan ke Irian Jaya atau ke Ujung Pandang.

* Pelabuhan laut, yang masuk ke jantung kota menstimuli kapal-kapal asing (Korea, Taiwan, dll) untuk merapat di kota Ambon.

* Terminal utama dan penunjang sarana angkutan darat, umumnya angkutan kota yang didominasi oleh dua etnis Ambon dan Bugis-Makasar.

* Tersedianya tempat-tempat hiburan, kelonggaran norma pergaulan, keramahan, personality yang tinggi bersahabat menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang sementara maupun menetap.

2. Komposisi dan Dessiminasi Penduduk

a. Propinsi Maluku:

- * Jumlah: 2.000.000
- * Pemeluk agama Islam: 59%
- * Pemeluk agama Kristen: 35%
- * Pemeluk agama Katolik: 6%
- * dan agama lainnya

b. Kodya Ambon:

- * Penduduk asli Ambon :
Jumlah: 311.000
- * Pemeluk agama Islam: 42%

Pemeluk agama Kristen: 52%
Pemeluk agama Katolik dll:
6%

* **Warga Pendetang:**

Suku Buton: Pendetang yang sudah ratusan tahun membaur dengan penduduk Ambon umumnya berprofesi: Petani, buruh, pekerja kasar dll serta beragama Islam.

Bugis dan Makasar: Pekerja kasar, pedagang klontong, preman, sopir, pegawai (agama Islam). Mulai masuk Kodya

Ambon sekitar tahun 1980-an, yang didorong oleh kebijaksanaan Pemda telah memberikan peluang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan Kodya Ambon di segala aspek kehidupan.

Cina: Profesi pedagang dan pengusaha sudah membaur dengan penduduk Ambon (agama Kristen).

Jawa, Sunda dan Batak: Profesi rumah makan, pegawai, pangkas rambut, dsb, agama Islam dan Kristen.

3. Tradisi "Pela Gandong"

* Harmoni kehidupan masyarakat Ambon telah berlangsung berabad-abad yang tidak mempersoalkan jati diri kesukubangsaan maupun keyakinan keagamaan.

* Buka berarti dalam kesehariannya tanpa gesekan/konflik baik sesama suku maupun antar etnis yang lebih sering disebut sebagai konflik antar gang/kelompok, na-

mun berkat tradisi budaya "Pela Gandong", khususnya untuk perselisihan yang dianggap serius masih dapat diredam melalui acara adat "Panas Pela" artinya mempererat kembali tali persaudaraan yang nampak mulai renggang.

* Disadari bahwa pranata adat ini seiring dengan perjalanan waktu, warga masyarakat utamanya kaum pemuda kurang begitu memahami makna upacara adat tersebut, disisi lain telah bergesernya posisi ketua adat serta tokoh-tokoh informal oleh keberadaan tokoh-tokoh formal yang secara sosiologis kurang mengakar/diterima oleh warga masyarakat karena dianggap lebih banyak memperjuangkan misi yang diembannya dan kurang memberikan perhatian terhadap aspirasi warga.

* Adat "Pela Gandong" ini hanya berlaku di Pulau Ambon, Pulau Seram dan sekitarnya, di Pulau-pulau lain seperti pulau Halmahera, Kepulauan Maluku Tenggara dan Pulau-pulau lain berlaku norma adat yang berbeda-beda.

* Upacara adat ini umumnya hanya berlaku di masyarakat pedesaan, untuk, masyarakat kota sulit diterapkan karena keragaman etnis dan budaya.

* Secara tradisional upacara adat "Pela Gandong" atau "Panas Pela" diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.

4. Potensi Konflik

Dengan memperhatikan karakteristik, kondisi sosial budaya masyarakat, yang telah mengalami perubahan yang begitu drastis, di mana pada era sebelumnya konflik hanya berkisar pada masalah-masalah harta milik, konflik antar gang/kelompok yang sudah biasa terjadi dan segera dapat diselesaikan dengan perdamaian maupun penghindaran.

Namun pada masa kerusuhan saat ini sumber konflik sudah meluas dan menyentuh ke aspek kesukubangsaan serta bermuara ke aspek keyakinan keagamaan termasuk kehormatan/harga diri. Ibarat tidak ada api kalau tidak ada asap, begitu pula kerusuhan massa di Ambon nampaknya ibarat api di dalam sekam yang setiap saat dapat membakar/meledak kembali. Bila dicermati dapat diidentifikasi beberapa sumber atau potensi konflik antara lain:

* Dengan semakin tumbuh berkembangnya keyakinan beragama serta aneka ragam aliran, berdampak pada semakin melebarnya jarak antara umat beragama, karena masing-masing aliran merasa paling benar. Suasana Psiko-Religi ini tidak terjadi pada masa-masa sebelumnya ekses lebih jauh meski sesama etnis dan satu garis keturunan/persaudaraan namun dalam menganut keyakinan agama berlainan, telah menimbulkan penurunan kadar harmoni hubungan sosial.

* Isolasi/batasan wilayah khususnya bagi para pendatang yang hidup/bertempat tinggal berkelompok pada suatu wilayah tertentu seperti kawasan Batu Merah mayoritas dari etnis BBM, kawasan pasar yang didominasi oleh preman dari etnis pendatang, etnis Buton yang tinggal di pedesaan/perbukitan, sekaligus sebagai batas sosial dan budaya utamanya dalam upaya saling memperebutkan sumber daya yang terbatas (*Scarcity Resources*) telah mencuatnya isu stereotip antar etnis yang telah melahirkan label BBM yang identik dengan Islam dan Ambon sebagai simbol Kristen. Untuk menonjolkan label ini digunakan simbol pita merah yang berarti Kristen dan pita putih berarti Islam.

* Kekaburan performance aparat Pemerintah dan keamanan Ambon yang seakan-akan telah goyah dari posisi netral dan sentral dalam mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat, berbagai kepentingan dari oknum aparat serta elite/politik yang lebih menojolkan kepentingan pribadi, kerabat, golongan dan kelompok etnis serta keyakinan keagamaan.

* Ketidaktuntasan dalam penanganan masalah serta keberpihakan oknum aparat menimbulkan suasana ketidakpastian, diskriminasi (ketidakadilan), rasa ketidakpuasan, kecemburuan, kecurigaan serta ketidakpercayaan warga kepada aparat, berdampak pada perilaku

main hakim sendiri meski pada awalnya dalam skala terbatas, namun belakangan dalam skala tak terbatas/luas.

III. Kerusuhan yang Merebak

1. Bentuk-bentuk Kerusuhan

* Pada awalnya penyerangan terjadi di antara kelompok-kelompok kecil/terbatas, seperti antara kelompok pemuda Mardhika menyerang kelompok Batu Merah

* Begitu luas biasanya para provokator memanfaatkan konflik sosial ini dengan menyebarkan isu-isu yang saling berseberangan, di mana di lingkungan warga Ambon disebarkan isu orang BBM akan menyerang warga Ambon, begitu pula sebaliknya di lingkungan warga BBM diberitakan warga Ambon akan melakukan penyerangan di samping itu diisukan pula telah dibantai etnis BBM atau sebaiknya terbunuh warga Ambon oleh kelompok yang bermusuhan.

* Nampak pihak pembentuk opini/isu menginginkan ledakan yang lebih dahsyat, yaitu menggeser isu kesukubangsaan menjadi isu keyakinan keagamaan dengan menyebarkan isu Gereja Maranata terbakar, dikelompok Islam disebarkan isu Masjid Al-Fatah terbakar yang kemudian berubah menjadi dibakar.

* Gereja dan Masjid merupakan simbol-simbol ritual yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh

oleh para pemeluknya bahkan oleh warga Ambon meski berbeda keyakinan agamanya (mereka saling menjaga dan menghargai). Karena dipandang sebagai rumah suci atau rumah Tuhan. Bila bangunan ini dirusak maka sama halnya merendahkan keyakinan sesuatu golongan, yang berarti menghina Tuhan Yang Maha Suci berarti akan mendapat karma/musibah. Sehingga tidaklah heran ketika isu tersebut dilontarkan, maka amarah masyarakat yang ditampilkan dalam wujud amuk massa tidak bisa terbendung lagi.

* Warga Ambon/Kristen menghancurkan fasilitas umum seperti pasar, pertokoan yang banyak dihuni warga BBM (Islam) dan membunuh penghuninya, serta pembakaran rumah-rumah penduduk yang dihuni oleh warga yang beragama Islam, namun belakangan pemburuan juga terhadap warga Ambon yang beragama Islam.

* Alat-alat yang dipergunakan untuk saling menghancurkan pada umumnya menggunakan parang panjang (1-2 m), panah, tombak, besi, linggis, palu besar, bahan bakar, bom buatan/tradisional, dll, dan tanda pengenal/symbol untuk membedakan golongan yaitu Kristen menggunakan ikat kepala merah sedangkan Islam ikat kepala putih.

* Pada awalnya warga minoritas di suatu kawasan tertentu masih dapat dilindungi oleh warga mayoritas, namun penyerangan selalu

datang dari warga diluar kawasan tersebut, akhirnya golongan minoritas banyak yang kocar-kacir dan eksodus keluar Ambon, mereka yang tetap bertahan berakhir menjadi korban amuk massa.

* Begitu pula sebaliknya warga BBM + Ambon Islam juga memburu, membantai serta merusak warga Kristen, penyerbuan besar-besaran dari warga Ambon Islam Jazirah Hittu yang mendengar khabar dari seseorang warga Hittu bernama Wahab (provokator lokal) yang memberitahukan bahwa masjid Al-Fatah dibakar massa, ribuan warga bermaksud mau turun ke Kodya Ambon untuk memberikan bantuan kepada warga Islam yang masih bertahan di Masjid Al-Fatah.

* Namun di tengah perjalanan di daerah Paso sekitar 20 Km dari Ambon massa dihalau oleh anggota Brimob Kompi A Sat Brimob Polda Maluku, sehingga massa merasa kecewa dan melampiaskan kekecewaan tersebut dengan menghancurkan, membakar, dan membunuh warga Kristen, di sepanjang perjalanan Paso, Durian Patah, Nania, sampai Telaga Kodok. Meski belakangan massa menyadari akan kekurangtepatan, dalam melampiaskan kekesalan dan bahkan telah minta maaf serta bersedia membantu memperbaiki rumah-rumah yang hancur, tidak menghapus ke-dukaan dan dendam warga Kristen kepada warga Islam.

* Sehingga saling menyerang di antara warga Kristen dan Islam senantiasa terjadi.

* Keberanian massa juga dipengaruhi oleh peran aparat keamanan yang tidak jelas dan kadang-kadang terkesan berpihak terhadap salah satu golongan tertentu, berdampak pada keberanian massa untuk melakukan penyerangan (karena merasa ada yang mendukung/backing). Di sisi lain warga sudah tidak percaya lagi akan posisi netralnya, sehingga berbagai himbauan dari aparat agar gencatan senjata atau berdamai tidak dihiraukan.

* Pengambil alihan Kodal dari Kapolda ke Damren kemudian meningkat ke Pangdam, hanya mampu menenangkan beberapa saat saja, bahkan kerusuhan yang lebih besar meledak di Pulau Haruku, Dobo dan terakhir di Tual Maluku Tenggara, satu sama lain saling menghancurkan antara golongan mayoritas agama terhadap golongan minoritas yang mendiami suatu pulau. Menghancurkan antara golongan mayoritas agama terhadap golongan minoritas yang mendiami suatu pulau.

* Belum reda kerusuhan di Tual, meledak kembali kerusuhan di kawasan Batu merah Kodya Ambon yang memakan korban 8 orang (Rakyat Merdeka, 22 September 1999).

* Nampaknya kerusuhan, masih terus berkecambuk, dikarenakan

adanya luka mendalam yang dialami masing-masing golongan, di mana anak, isteri, suami, orang tua, saudara telah menjadi korban kebrutalan, meski berbagai upaya aparat formal maupun informal dilakukan, namun tokoh-tokoh kurang membuahkan hasil, luka telah berubah menjadi dendam yang berkepanjangan, yang berarti daur sejarah berulang dan kembali ke zaman primitif yang telah dialami oleh nenek moyang kita berabad-abad yang lalu. Harkat dan martabat manusia sudah tidak jelas dan sulit dibedakan antara manusia dengan makhluk lain (non insani).

2. Hakekat Kerusuhan

Kerusuhan Ambon dipandang sebagai konflik antara dua golongan yang masing-masing pelakunya pada awalnya menggunakan atribut suku bangsa dalam menggalang solidaritas kelompok bergeser pada penonjolan atribut keyakinan keagamaan, dengan pengaktifan stereotip dan labelling sebagai acuan untuk membenaran dalam tindak kekerasan yang paling menghancurkan. Isyu-isyu keagamaan sangat efektif untuk membakar emosi/sentimen massa yang saling konfrontatif. Isyu-isyu telah terjadinya pembunuhan atau penyerangan oleh satu golongan keagamaan terhadap golongan lain, cepat meluas di seluruh penjuru wilayah Ambon. Hal tersebut didorong oleh peran alat komunikasi (Handy Talky), pesawat telepon maupun

oknum warga yang sengaja menyebarkan isyu-isyu tersebut.

3. Provokator dan Pembentukan Opini

* Begitu sistematisnya dalam pembentukan opini sehingga para pelaku atau warga yang terlibat konflik sendiri merasa terkesima dan terheran-heran nemanggapi eskalasi ancaman yang meningkat selaras dengan eskalasi pembentukan opini, melalui kegiatan provokasi (penyebaran isyu).

* Pada awal konflik, isyu yang merebak di kalangan etnis Ambon adalah isyu anti warga BBM. Warga Buton yang umumnya hidup di pedesaan/perbukitan pada era sebelum konflik tidak pernah terlibat konflik dengan etnis Ambon, dan bahkan mereka sudah menyatu dengan penduduk asli karena sudah beratus-ratus tahun menetap dan bertani di Pulau Ambon. Namun kedekatan ini tidak lagi menjadi pertimbangan rasional karena sudah termakan provokasi sehingga menutup jalinan kedekatan sosial, yang menonjol adalah sentimen etnis yang sempit dan justru warga Buton menjadi obyek pemburuan dan penghancuran bersama-sama dengan warga Bugis dan Makasar.

* Isyu selanjutnya dicoba dilontarkan untuk anti pada semua pendatang termasuk suku Jawa, Sunda, Madura namun isyu ini nampaknya kurang berhasil, sehingga isyu dialihkan dari kesukubangsaan ber-

geser ke isu keyakinan keagamaan, dengan menyebarkan informasi ke kalangan Islam bahwa Masjid Al-Fatah dibakar, begitu pula sebaliknya ke golongan Kristen sebarakan isu Gereja Maranata telah dibakar.

* Kian meluasnya isu permusuhan antara golongan Islam dengan Kristen terwujud dari saling menghancurkan di antara kedua golongan keagamaan tersebut.

* Merebaknya rasa kecemasan dan ketakutan warga masyarakat yang berlebihan, menjadikan isu sekecil apapun dipandang sebagai isu yang benar, termasuk bunyi-bunyian, seperti bunyi tiang listrik yang dipukul maupun bunyi ledakan bom atau tembakan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap eksistensi kehidupan, sehingga harus ditanggapi dengan respons yang spontan untuk menyelamatkan diri atau menyiagakan diri dengan perlengkapan perang, seperti: parang, tombak, panah, besi, maupun berbagai jenis senjata tajam serta penggunaan ikat kepala merah (golongan Kristen) dan ikat kepala putih (Islam). Langsung berdiri di depan rumah masing-masing, bergerombol di ujung gang/jalan, menutup jalan dengan tong, pohon yang dirobuhkan dan berbagai rintangan lainnya.

* Pada awal kerusuhan satu-satunya etnis yang terbebas dari amuk massa adalah warga etnis Cina, tidak satupun toko yang

dibakar, namun belakangan mereka juga menjadi sasaran penghancuran.

* Isyu kecemburuan di lingkungan Pemda yang dinilai bahwa pejabat-pejabat yang duduk di Pemda kurang mewakili etnis mayoritas yang ada di Ambon seperti Gubernur mewakili/symbol dari golongan Islam, wakil gubernur symbol warga Katholik dan Sekwilda seharusnya diambil dari representasi golongan Kristen, begitu pula komposisi jabatan-jabatan penting lainnya harus dibagi secara adil/proporsional, bila hal tersebut dipenuhi maka kerusuhan akan dapat segera diredam.

* Mencuatnya isu keberpihakan aparat keamanan dalam menangani kerusuhan kepada golongan tertentu menimbulkan saling curiga di kalangan aparat TNI dan Polri, di samping memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap netralitas aparat keamanan, karena dianggap telah mendukung salah satu golongan yang bermusuhan. Hal ini terbukti dengan terjadinya penembakan gereja dan masjid di kawasan Ahuru-Karang Panjang Ambon. Bahkan merebak pula isu anti Polri ketika terjadi kasus penembakan warga Islam yang sedang melaksanakan Shalat Subuh telah ditembak oleh anggota Polri. Isyu ini di blow up oleh media massa lokal maupun nasional, dan bahkan oleh Majelis Ulama Ambon dibenarkan, serta mengirim surat ke Menteri Agama, yang selanjutnya diteruskan

ke Presiden RI, dan Presiden RI menyatakan rasa prihatin atas tindakan aparat Polri tersebut.

*Patut dihargai, Polda Maluku segera melacak dan mengkonfirmasi kasus yang sesungguhnya terjadi, dengan melakukan investigasi para saksi di TKP dan ternyata tidak setragis seperti apa yang telah diberitakan dan tuduhan penembakan oleh anggota Polri tidak bisa dibuktikan secara materil maupun formil. Akhirnya Ketua MUI Ambon didesak untuk memberikan penjelasan/press release ke media cetak, dan akibatnya sungguh luar biasa, massa melakukan demonstrasi ke kantor MUI dan menuntut Ketua MUI agar mundur. Sayangnya klarifikasi ini hanya diekspose oleh media lokal, sementara di media nasional tidak mendapat perhatian sehingga opini yang terbentuk semakin memperburuk citra Polri.

4. Dampak Kerusuhan

a. Suasana Mencekam

* Di sana sini berserakan puing-puing dan bekas gedung/rumah terbakar di segenap penjuru Kodya Ambon.

* Rumah kosong tanpa penghuni

* Pasar terbengkalai tanpa pedagang, di beberapa ruas jalan muncul pasar kaget.

* Kantor pemerintah maupun swasta tutup termasuk toko dan rumah makan, hanya di tempat-

tempat tertentu yang masih berani buka karena ada jaminan dari aparat keamanan.

* Suasana lenggang, lalu lintas sepi hanya kendaraan Militer dan Polri yang masih kelihatan melintas di jalan.

* Sekolah-sekolah tutup, kecuali di lokasi/dukuh tertentu masih dibuka karena dianggap masih relatif aman.

* Sesekali terdengar bunyi tembakan dan asap mengepul.

* Pasokan bahan makanan dan bahan bakar mengalami hambatan.

* Warga masyarakat yang keluar rumah untuk belanja/cari bahan makanan dipenuhi perasaan waswas dan penuh curiga.

* Aparat keamanan nampak berjaga-jaga di ujung jalan, tempat/obyek vital, lingkaran luar lokasi rawan/basis konflik.

b. Duka Nestapa dan Kebencian Sosial

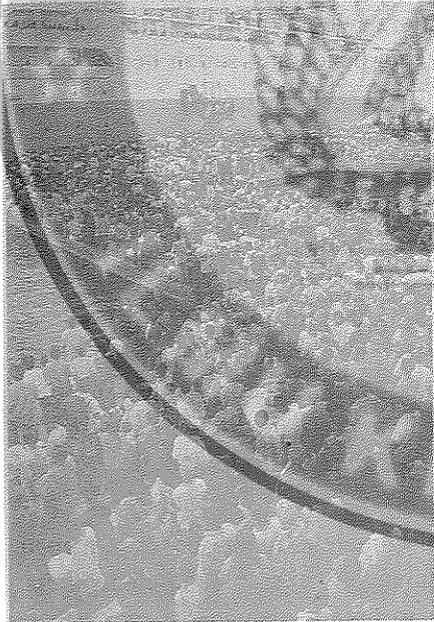
* Di samping musnahnya harta benda, hilang pula sanak keluarga yang semakin menambah penderitaan warga.

* Duka nestapa telah menumbuhkan perasaan kebencian dan luapan emosi untuk saling melakukan balas dendam.

* Tokoh formal maupun non formal seakan tidak mampu meredam dendam yang membara bahkan sering kali warga justru menanyakan balik kepada para tokoh yang mencoba menenangkan emosi.

massa: "Saudara tidak merasakan penderitaan kami, karena saudara tidak mengalami kehilangan sanak saudara, bagaimana kita bisa tenang, diam meratapi musibah ini".

* Warga Ambon saat ini benar-benar telah tercerai-berai, meski dulunya satu garis keturunan, satu marga, satu pela, kini telah dipisahkan oleh barier permusuhan yang tak kunjung surut dan membentuk golongan-golongan sosial dengan penonjolan sentimen keyakinan keagamaan.



Eksodus warga pendatang di Ambon. Ada semangat menghabisi. (Photo: Panji no.48/1999)

IV. Kiat Aparat dalam Mengatasi Kerusuhan

1. Aparat Pemda

* Dengan tidak berfungsinya sebagian besar kantor-kantor Peme-

rintah sulit untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

* Posko keadaan krisis di Pemda masih belum berperan secara optimal dalam menganalisis perubahan situasi yang berkembang setiap saat.

* Penanganan evakuasi pengungsian/eksodus yang kurang terkoordinasi, bersyukur dedikasi/pengabdian aparat keamanan Polri yang tinggi untuk melakukan evakuasi dan pergeseran dari kantong-kantong pengungsian di dermaga laut (murni inisiatif petugas keamanan).

* Begitu pula penanganan korban kerusuhan mengalami kendala baik pada saat pertolongan pertama maupun perawatan selanjutnya, dengan alasan petugas kesehatan terancam jiwanya serta persediaan obat-obatan yang terbatas dan kian menipis, di samping dukungan kendaraan ambulance yang tidak memadai.

* Penanganan pengungsi baru menyentuh aspek fisik (droping makanan), namun belum mengarah pada rehabilitasi psikologis trauma pasca kerusuhan utamanya terhadap kaum ibu-ibu dan anak-anak, yang apabila hal ini tidak ditangani dengan baik dapat menumbuhkan bibit permusuhan/balas dendam di kemudian hari.

* Kelambanan aparat membersihkan puing-puing bangunan, sampah menggunung dan berserakan, rintangan jalan, fasilitas umum

yang porak poranda belum nampak adanya tanda-tanda perbaikan.

2. Aparat Kejaksaan dan Peradilan

* Keraguan dan kekhawatiran aparat, untuk segera menyidangkan kasus kerusuhan meski sudah dilimpahkan oleh penyidik Polri ke Penuntut Umum.

* Beberapa kasus yang telah divonis kurang mencerminkan rasa keadilan, di mana vonis yang dijatuhkan terlalu ringan dibandingkan kejahatan yang dilakukannya, menimbulkan rasa ketidakpuasan bagi keluarga korban.

3. Aparat Keamanan/Polri

* Pihak aparat dalam posisi yang serba salah kelompok merah menganggap aparat berpihak pada kelompok putih, begitu pula sebaliknya pihak putih menuduh aparat memback up kelompok merah.

* Posisi tersebut lebih dipersulit dengan olah/tindakan beberapa oknum TNI/Polri yang indisipliner.

* Meski demikian sebagian masyarakat masih percaya pada aparat untuk bersikap netral.

* Namun situasi terakhir telah terjadi insiden di kawasan Batu Merah dan Ahuru Kodya Ambon pada tanggal 21 September 1999 (Rakya Merdeka) aparat tidak memposisikan sebagai penengah tapi justru menembaki dari ke-

jauhan ke arah dua kelompok yang sedang konflik (melakukan penyebaran).

V. Analisis dan Alternatif Penanganan Konflik

1. Analisis

a. Hubungan antar Suku Bangsa

* Mencermati sejarah pertumbuhan masyarakat Ambon, diperoleh gambaran bahwa interaksi antara warga asli Ambon dengan warga pendatang sudah berlangsung ratusan tahun yang lalu.

* Asal muasal etnis Ambon sebenarnya berasal dari satu keluarga namun menganut keyakinan agama yang berbeda yaitu Islam dan Kristen, dari luar pulau Ambon masuk dan mendiami pulau Ambon, yang beragama Islam mendiami Jazirah Utara, sedangkan yang beragama Kristen hidup di wilayah Selatan Pulau Ambon.

* Meski secara geografis dan religi mereka hidup terpisah, namun hubungan kekerabatan/persaudaraan tetap terjalin dan justru makin berkembang menjadi besar melalui media perkawinan. Untuk menguatkan ikatan keluarga tersebut secara periodik dilakukan "Panas Pela".

* Khusus etnis Buton sebagai warga pendatang telah ratusan tahun hidup berdampingan dan menyatu dengan warga Ambon. Hubungan mereka bersifat fungsional dan

saling ketergantungan antara tuan tanah (Ambon) dan petani (Buton).

* Sedangkan warga Bugis Makassar, sekitar tahun 1980-an secara bertahap berdatangan ke Kodya Ambon dikarenakan adanya peluang usaha dan kebijaksanaan Pemda waktu itu. Sehingga mereka lebih mendominasi kawasan pasar, pelabuhan serta angkutan kota (meski berimbang dengan etnis Ambon).

* Adanya sekelompok etnis BBM yang berprofesi preman menimbulkan jarak sosial antara etnis BBM dengan etnis Ambon. Warga Ambon merasa terganggu dan cemas akan keberadaan preman tersebut.

* Sementara etnis pendatang yang lain umumnya berprofesi sebagai pegawai negeri dan pedagang (umumnya Cina) lebih mudah beradaptasi dan membaur dengan warga Ambon.

b. Pembentukan Opini

* Penyebaran isu dan pembentukan opini berlangsung secara sistematis, menyertai dan memanfaatkan setiap perkembangan perkembangan situasi.

* Sikap fleksibilitas, kelenturan dalam mengubah teknik penyebaran menunjukkan para aktor di balik provokator telah menguasai/memahami kondisi sosiologis dan psikologis warga Ambon.

* Model umum yang diterapkan dengan teknik pembentukan opini secara ekskalatif, dari isu yang terbatas, berkembang dan meningkat menjadi isu besar dan berdampak luas serta membangkitkan sentimen-sentimen primordial, keagamaan, emosional, harga diri, kebencian dan balas dendam.

c. Faktor Pemicu Kerusuhan/Disintegrasi.

Mengacu pada pandangan smelser bahwa kerusuhan dan agresivitas massa senantiasa didahului oleh :

* Frustrasi sosial.

* Situasi sosial yang kondusif untuk terjadinya kerusuhan.

* Diikuti adanya isu dan opini publik yang mendorong ke arah kerusuhan.

* Peluang pengerahan massa.

* Kendali sosial oleh aparat sedang lemah (Sarlito W., 1999).

Bila dikaitkan dengan fakta empirik nampak adanya indikasi ke arah pandang di atas, hal tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

* **Frustrasi sosial.** Menyeruak ke permukaan karena adanya pressure sosio-psikologis, kesewenang-wenang, ketidakadilan dan pemerataan dalam pemanfaatan sumber daya politik, ekonomi dan sosial budaya, sehingga menimbulkan frustrasi sosial, karena pihak imperior tidak

mampu mengatasi tekanan dari pihak superior.

*** Situasi sosial yang kondusif mendorong terjadinya kerusuhan**

- Gesekan, konflik sosial yang tidak terselesaikan dengan tuntas, menimbulkan konflik berulang-ulang.
- Sikap keterbukaan/fleksibilitas warga Ambon, sangat rentan terhadap perubahan dengan berbagai implikasinya.
- Semakin menguatnya eksistensi warga pendatang di segala aspek kehidupan, telah menggeser sebagian posisi etnis Ambon, telah menimbulkan kekecewaan, kecemburuan dan rasa ketidakadilan sepihak (merasa terpinggirkan di negeri sendiri).

*** Isu dan opini publik yang mendorong ke arah kerusuhan**

- Pembentukan opini publik melalui penyebaran isu yang sistematis dan menyertai eskalasi perkembangan kerusuhan.
- Pada era sebelumnya belum pernah terjadi konflik antar agama maupun antar etnis, konflik yang sering muncul adalah konflik antar kelompok pemuda.
- Selama kerusuhan isu terus bergulir, melalui berbagai media baik media telekomunikasi, selebaran maupun berita dari mulut ke mulut yang diyakini kebenarannya.

- Penerimaan/kepercayaan terhadap berita lebih didorong oleh rasa ketakutan, cemas dan ketidakpastian keadaan.

- Kerumunan massa di ujung-ujung gang sangat efektif sebagai penyampaian berita/isu yang disebar.

- Lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas aparat keamanan untuk meredam konflik.

*** Faktor Pemicu.**

- Adanya perseteruan yang berkepanjangan antar kelompok pemuda Mardhika (mayoritas Ambon dan Kristen) dengan kelompok Batu Merah dan Islam).

- Kasus pemerasan terhadap sopir angkot atas nama Yopi (Ambon Mardhika) dan preman Usman (BBM Batu Merah) sebagai representasi dari kedua kelompok pemuda yang sering konflik, telah dimanfaatkan dengan sempurna.

*** Peluang Pengerahan Massa.**

- Pada awalnya untuk menggalang massa dengan memunculkan sentimen kesuku-bangsaaan yaitu Ambon Versus BBM, nampaknya berhasil dengan baik.

- Sungguh di luar dugaan isu keyakinan keagamaan yang dilontarkan para provokator sangat mujarab, terbukti telah mampu menyelimuti isu etnis/kesuku-bangsaaan. Dan dampaknya sung-

guh dahsyat dalam penggalangan massa dan tindakan penghancuran satu sama lain.

*** Kendali Sosial oleh Aparat Lemah.**

- Ketidaksiapan aparat dalam mengantisipasi kerusuhan, terbukti dengan banyaknya pejabat teras yang sedang mengambil cuti Hari Raya, sehingga para pejabat yang berperan mengendalikan situasi kamtibmas dalam kondisi lemah.
- Aparat tidak terlatih untuk menghadapi kerusuhan yang melibatkan massa begitu besar, karena selama ini belum pernah terjadi kerusuhan massa yang berkepanjangan seperti saat ini.
- Disamping personil yang terbatas, sarana pendukung tugas aparat pun dalam kondisi memprihatinkan, selama penanganan kerusuhan justru aparat banyak dibantu oleh masyarakat umumnya dalam penyediaan sarana transportasi.
- Koordinasi antara aparat keamanan dan Pemda banyak mengalami kendala, sehingga seringkali aparat keamanan lebih pro aktif untuk menangani masalah-masalah sosial seperti penanganan korban, evakuasi dan pergeseran pengungsi.
- Kurang optimalnya kinerja aparat dalam menangani kerusuhan, antara lain dikarenakan tidak dimilikinya data yang akurat tentang kesukubangsaan dan

latar belakang budaya masyarakat. Termasuk akurasi data tokoh-tokoh informal yang benar-benar mengakar di lingkungannya. Sementara tokoh masyarakat yang ada lebih bersifat tokoh seremonial yang kurang kredibel di mata masyarakat. Sehingga tokoh tersebut tidak dapat berbuat banyak/tidak mampu meredakan emosi massa, meski sudah dibentuk Tim Enam yang terdiri dari tokoh agama dan para pakar sebagai mediator (juru damai).

- Aparat seringkali terlambat, tidak efisien dan tidak tepat dalam menangani kerusuhan, sehingga menimbulkan preseden yang kurang menguntungkan, sehingga timbul penilaian bahwa aparat tidak netral dan berpihak pada salah satu kelompok yang bertikai.

2. Alternatif Penanganan Konflik.

a. Meredam isu/opini

* Dalam suasana yang menegam dan penuh ketakutan, manusia cenderung kehilangan identitas dan kepercayaan diri baik pada diri sendiri, lingkungan maupun kepercayaan diri kepada Yang Maha Hidup.

* Oleh karenanya perlu diserukan kepada seluruh masyarakat Ambon melalui berbagai media massa maupun tatap muka langsung, dalam keadaan bagaimanapun

harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, sesuai agamanya masing-masing.

* Tidak mudah terpancing isu-isu yang berkembang, justru yang utama adalah perlu dicari dan dicek siapa penyebar isu pertama tersebut.

* Aktifkan kembali siskamswarkarsa, bentuk strukturnya yang jelas, tentukan peran masing-masing warga, tunjuk secara musyawarah orang-orang yang dipandang sebagai organizer/koordinator dalam setiap analisis isu dan alternatif tindakan yang diambil.

* Tingkatkan kewaspadaan terhadap penyusup/provokator, untuk itu kenali betul orang-orang yang berada dalam kawasan masing-masing.

* Koordinasi yang sebaik-baiknya dengan aparat keamanan, sehingga perlu memahami benar lokasi plotting/penempatan aparat keamanan yang terdekat dengan lingkungan warga, dikenalnya nomor-nomor telepon posko krisis, kantor Polisi, kantor TNI AD, AL, AU yang ada di Kodya Ambon. Di sisi lain pihak aparat keamanan harus menyebarkan selebaran daftar nomor telepon penting yang perlu diketahui masyarakat, dan ditempelkan di tempat-tempat umum, pos-pos pam swakarsa, serta di tempat strategis lainnya.

b. Penguatan Perikat Integrasi Sosial.

* Perlunya pemahaman konsep kewarga-negaraan Indonesia yang menurut UUD 45 dan Deklarasi PBB tentang HAM mengakui, menghormati dan menjunjung tinggi segala hak dan kewajiban manusia sebagai bangsa yang beradab.

* Sebagai manusia yang beradab memiliki derajat kemanusiaan yang tertinggi, mempunyai kemampuan berfikir, berperasaan dan bermoral sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, perlu diupayakan peluang untuk terwujudnya:

Kondisi moral individu yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk.

Suasana yang kondusif untuk munculnya keberanian mengungkapkan perasaan-perasaan, sentimen-sentimen perorangan maupun kolektif (keterbukaan).

Jaminan kehormatan/harga diri sebagai cerminan dari jati diri.

Rasa aman, tenang dan keteraturan dalam kehidupan.

* Adanya sistem Hukum Nasional dan Lokal serta Implementasinya secara adil dan beradab.

Beberapa produk hukum lebih bersifat Yuridis Formal, namun belum sepenuhnya mengakar/diterima secara sosiologis oleh masyarakat (lebih mengutamakan kepentingan pusat). Belakangan ini

disadari dengan dikeluarkannya UU tentang Otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah serta berbagai perundang-undangan lainnya.

Dihidupkannya kembali peranan pranata adat maupun ketentuan/kesepakatan bersama yang dilembagakan menjadi norma adat dan dijadikan landasan bagi formulasi peraturan daerah.

Penegakan hukum yang efektif oleh aparat yang terbebas dari sikap keberpihakan (netral dan proporsional), dengan penjatuhan sanksi kepada tersangka yang seimbang dengan kejahatannya oleh Lembaga Peradilan.

*Hapuskan segala bentuk premanisme disegala aspek kehidupan ekonomi, politik maupun sosial baik dalam skala kecil-lokal maupun skala besar-normal.

* Reorientasi TNI dan POLRI untuk mau mereformasikan diri dengan melakukan redefinisi, reposisi dan reaktualisasi status dan peran TNI/POLRI utamanya dalam mengemban misi penegakan hukum, pengayom, pelindung, pelayanan dan pendorong masyarakat, benar-benar diwujudkan dalam karya nyata bukan hanya sekedar konsepsi, sehingga komentar yang kurang bersahabat seperti: Paradigma baru tapi cara lama, bisa dieleminir/dihapuskan.

* Selaras dengan perkembangan masyarakat yang mengarah ke konsep masyarakat modern atau dengan penyebutan lain masyarakat madani (Civil Society) yang antara lain sangat menonjolkan : Sikap keterbukaan, demokratisasi, keadilan, supremasi hukum, menuntut kepekaan Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan masyarakat dalam memikirkan kembali berbagai



Sisa-sisa kerusakan di Ambon. (Photo Gatra no.12/1999)

kebijaksanaan khususnya di bidang ekonomi. Perlu pemahaman dan melakukan reorientasi pentingnya kapital dan bukan tidak lagi mengutamakan eksploitasi sumber daya dalam skala besar untuk kepentingan sesaat.

* Dari perspektif konflik, bahwa konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam arti mendorong munculnya kompetisi/persaingan, selama persaingan tersebut berjalan secara adil, jujur dan beradab, bila menyimpang dari norma tersebut maka akan terwujud pertikaian yang saling menghancurkan karena satu pihak (suku bangsa) merasa dikhianati, diperlakukan tidak adil/sewenang-wenang, dihinakan, ditindas. Suasana tersebut berlangsung sebelum dan selama konflik/kerusuhan Ambon berlangsung.

* Untuk menggalang kekuatan dimunculkan isu/sentimen suku bangsa, kemudian di blow up isu keyakinan keagamaan sehingga mengcover isu suku bangsa. Sebagai upaya solusinya, harus kembali ke jati diri bangsa, yaitu : Reorientasi, nilai-nilai persatuan, suasana kehidupan yang saling menghormati hak-hak azasi, kerukunan antar umat, sistem hukum yang adil dan beradab yang menampung aspirasi lokal (kompromi sosial) serta konsistensi dalam penerapannya (menjamin kepastian hukum). Sebagai alternatif penangkalannya adalah:

Meningkatkan kewaspadaan penggunaan isu suku bangsa dan keagamaan untuk kepentingan menggalang kekuatan massa dalam memenangkan konflik/persaingan.

Agama bukanlah komoditi politik atau alat politik, tetapi pedoman bagi kehidupan yang penuh dengan muatan moral dan etika yang sakral yang harus diikuti dan ditaati oleh pemeluknya (Parsudi Suparlan, 1999). Agama merupakan milik pribadi (orang perorangan) yang paling hakiki dan harus dihormati sebagaimana tertuang di dalam UUD 45.

* Dalam menguatkan kembali perekat integrasi dapat ditempuh melalui 3 (tiga) pola yaitu:

Integrasi normatif (standar persepsi, nilai yang sama).

3. Gencatan Senjata Total dan Pengamanannya.

* Dengan menggunakan berbagai pengaruh (media formal/non formal) perlu segera dilakukan gencatan senjata serta menghentikan segala bentuk tindak kekerasan antar kelompok bertikai.

* Hal tersebut menuntut jaminan keamanan yang menjangkau ke segenap pelosok wilayah dan menyentuh kedua kelompok religi yang bertikai.

* Kesemua itu dapat terwujud manakala kemampuan aparat keamanan (kuantitas maupun sarana pendukung tugas) seimbang dengan

kompleksitas ancaman yang dihadapi. Selama ini petugas dalam kondisi yang serba terbatas, seperti sarana komunikasi, transportasi untuk evakuasi pengungsi maupun pergeseran pasukan dalam jumlah yang tidak memadai, sehingga terpaksa meminjam ke warga masyarakat.

* Selaras dengan sejarah pertumbuhan masyarakat Ambon, secara geografis warga masyarakat Islam mayoritas mendiami Jazirah Utara Pulau Ambon dan warga Kristen hidup dan berkembang di wilayah Tengah serta bagian Selatan Pulau Ambon.

Meski antara kelompok Islam dan Kristen tidak terpisah secara tegas namun dengan model pengelompokan tersebut telah terwujud suasana kehidupan yang aman dan damai.

* Perjalanan waktulah yang merubah pola hidup masyarakat Ambon, lebih-lebih dengan kian meningkatnya arus pendatang, semakin membuka barier/katup-katup komunikasi sosial sehingga terjadilah pembauran di antara warga suku bangsa utamanya di Kodya Ambon, dimana norma-norma sosial terasa longgar.

* Mencermati sejarah pertumbuhan Ambon tersebut, menyadarkan warga bangsa untuk melakukan salah satu alternatif peredaman konflik melalui pengamanan ekstra dengan penerapan sistem penyekatan/isolasi sosial yang bersifat

sementara khususnya untuk lokasi-lokasi yang rawan konflik.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya Pemda/Instansi terkait perlu menyiapkan fasilitas umum darurat seperti: Pasar, toko-toko kelontongan/warung sederhana, sedangkan aparat keamanan bertugas menjamin kelancaran dan keamanan berlangsungnya kegiatan tersebut. (Pemerintah/Pihak ke III sebagai Mediator).

Ditindaklanjuti dengan program transmigrasi yang terencana dan terpadu serta pembinaan berlanjut utamanya rehabilitasi sosio-psikologis.

4. Pemerataan dan Keadilan dalam Pemanfaatan Sumber Daya.

* Menghidupkan kembali serta menghargai hak budaya komuniti untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, kepemilikan atas tanah-tanah dan wilayah adat, merupakan perwujudan azas Bhineka Tunggal Ika yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk menjaga keutuhan bangsa.

* Melibatkan secara aktif warga masyarakat untuk membuat kesepakatan bersama dalam pemanfaatan sumber daya sehingga secara bertahap cita-cita pemerataan dan keadilan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

* Terciptanya suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan Pe-

merintahan melalui perimbangan pengisian pejabat secara proporsional yang mencerminkan keberadaan representasi dari masing-masing kelompok yang bertikai.

5. Pemberdayaan Tokoh-tokoh Informal.

*Memberdayakan eksistensi kepala adat, tokoh-tokoh riil informal serta tokoh-tokoh keagamaan, untuk lebih proaktif dalam menenangkan warga.

*Dukungan yang sungguh-sungguh dari Pemda untuk mempercepat terwujudnya agenda di

atas, melalui penerbitan serangkaian kebijaksanaan serta partisipasi masyarakat.

VI. Penutup

Demikian sekilas hasil pengamatan kasus kerusuhan Ambon dari perspektif hubungan antar suku bangsa dan pendekatan konflik, sebagai bahan masukan serta pengkajian lebih lanjut bagi pengambil kebijaksanaan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam penanganan konflik antar golongan sosial di Ambon. □